



Berharap Pemungutan Suara Ulang

■ Tim IP-AF Matangkan Materi Gugatan ke MK

YOGYA, TRIBUN - Tim Paslon Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-AF) sedang mempersiapkan materi untuk melakukan gugatan Pilkada 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menuntut Pilkada yang transparan, tim pemenangan berharap adanya pemungutan suara ulang di Pilkada Kota Yogyakarta.

Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1, Danang Rudyatmoko mengatakan, pihaknya masih mematangkan dan merampungkan materi yang akan diajukan ke MK sebagai bahan gugatan. Namun Danang tidak bisa menyebut isi materi gugatan tersebut.

"Kita belum bisa cerita isi materi tersebut. Tapi, intinya

adanya ketidakpastian atau konsistensi dengan kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Pilkada 2017 ini," ujar Danang, Sabtu (25/2).

Dalam proses perstapan, Danang dan tim sedang mengumpulkan para saksi-saksi yang bisa memperkuat materi gugatan. Adapun pada hari Senin (27/2) besok, materi sudah selesai disusun.

"Saat ini masih persiapan pemberkasan materi, kita menyiapkan saksi-saksi dari Paslon nomor urut 1," jelas Danang di sela-sela rapat internal PDIP Kota Yogyakarta.

Ia mewakili tim paslon nomor urut 1 berharap bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Hal itu diperlukan untuk membuktikan pemilihan

yang transparan dan akurat. Danang menyebut, ini karena KPU Kota Yogyakarta enggan membuka kotak suara tidak sah yang berjumlah 14 ribu suara lebih.

"Di sini keberatan kami bukan saja soal selisih angka, namun juga proses soal pembukaan kotak suara, kenapa hanya beberapa saja yang dibuka. Jadi, ada ketidakpastian atau konsistensi dari KPU Kota Yogyakarta," ungkap Danang.

Selain akan melayangkan gugatan ke MK, pihaknya juga akan melaporkan komisioner KPU Kota Yogyakarta dan Panwas Kota Yogyakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menilai ada kecurangan yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

ta.

Tim paslon nomor urut satu keberatan dengan KPU karena ditemukan 14 ribu lebih surat suara tidak sah. Desakan untuk dibukanya kotak suara tidak sah, terus dilaikan namun KPU enggan membuka karena tidak ada data faktual yang membenarkan pembukaan kotak suara.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan prosedur pelaksanaan Pilkada secara netral, independen, dan transparan. Adapun pembukaan kotak suara secara sampling sudah mencapai persetujuan dari Panwas.

Sesuai prosedur

Komisioner Bawaslu DIY Bidang Penindakan Pelanggaran, Sri Werdiningsih menyebut, KPU Kota Yogyakarta telah bekerja sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. KPU juga telah menaati rekomendasi Panwas saat dilakukan rekapitulasi suara di kantor KPU Kota Yogyakarta.

"Kami dari Bawaslu DIY tidak melihat adanya perlakuan yang berbeda dari KPU terhadap kedua paslon, di sini KPU Kota Yogyakarta cukup netral," ungkap Sri.

Terkuat akan dilakukannya gugatan ke MK, Sri menjelaskan bahwa nantinya Panwas Kota Yogyakarta yang akan diminta keterangan terkait materi gugatan dari salah satu paslon. (gdi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>KPU Kota Yk</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <i>Panwas Kota Yk</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.	<i>✓ Untuk diketahui</i>	
5.		

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005